



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASFUL ANWAR. US
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 993257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.740.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 370.000.000

1. MOBIL, PAJERO A Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, BRIO E SATYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, NMAX NMAX HONDA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, PCX HONDA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, VARIO HONDA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 20.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.461.356

F. HARTA LAINNYA Rp. 68.500.000



Sub Total	Rp.	2.234.961.356
III. HUTANG	Rp.	1.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.233.961.356

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.